

## **BAB II**

### **KERJASAMA KELOMPOK OPOSISI (IM, SALAFI DAN PARTAI DEMOKRATIK NASIONAL) DALAM MENGGULINGKAN HUSNI MUBARAK**

Bab ke-II penulis mengisi dengan pembahasan : Deskripsi Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwanul Muslimin, Partai An-Nur Salafi Mesir sebagai oposisi Sayap Kanan Mesir, Partai Demokratik Nasional, Era Nasser, Era Sadat dan Husni Mubarak. Kerjasama Partai Oposisi dalam Menggulingkan Husni Mubarak.

#### **A. Partai Kebebasan Dan Keadilan Ikhwanul Muslimin**

Partai Keadilan dan Kebebasan terlahir dari gerakan dakwah islam di Mesir dipimpin oleh Hasan Al-bana. Hasan Al-Bana memiliki pandangan bahwa dakwah harus memiliki potensi yang menyeluruh terhadap semua sektor kehidupan. Partai Kebebasan dan Keadilan lahir pada tahun 1928 pada saat itu banyak sekali ketimpangan sosial yang mewabahi masyarakat Mesir sendiri. Cita-cita Ikhwanul Muslimin yakni "Hidup Mulia atau Mati syahid". Cita-cita tersebut telah dipromosikan oleh pemimpin terdahulunya yakni Hasan Al-bana dan Al-Maududi, sehingga cita-cita tersebut memiliki kesamaan terhadap baginda Rosulullah SAW.

Ikhwanul Muslimin sangat berpengaruh di Mesir semenjak lahirnya Partai Kebebasan dan Keadilan. Masyarakat Mesir telah menyadari bahwa pentingnya dakwah dalam partai politik. Sehingga terciptalah pemerintahan yang berbasis

nilai-nilai syariat islam dalam membangun suatu negara yang demokratis. Partai kebebasan dan Keadilan menganggap semua sektor kehidupan bernegara dan masyarakat harus dilandasi oleh nilai-nilai islam sehingga dakwah menjadi stir dalam menyebarkan idiologi Ikhwanul Muslimin. Kemudian selain itu, Ikhwanul Muslimin menerima sebuah sistem demokrasi yang berasal dari barat sekalipun demi terciptanya cita-cita Islam.

Selain itu, Ikhwanul Muslimin terlahir untuk menegakan syariat islam yang kaffah dan menolak mutlak sekularisme dan liberalisme. Karena Ikhwanul Muslimin menganggap bahwa sekularisme dan liberalisme merupakan idiologi yang merusak ummat islam karena di dalamnya terdapat sebuah nilai negatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai islam. Mulai dari pemerinthan nasser, Saddat dan Husni Mubarak, Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu organisasi terlarang dan berbahaya sehingga pada saat tiga periode oleh sistem otoriter, Ikhwanul Muslimin terus diburu dan dibekukan langkah dakwahnya.

Sampai darah penghabisan jihad di jalan Allah. Ikhwanul Muslimin melalui Partai kebebasan dan Keadilan terus-menerus mempromosikan nilai-nilai politik islam yang menyeluruh. Sehingga pada saat sekarang politik dan agama islam telah melekat bagaikan sisi mata uang. Dengan demikian liberalisme dan sekularisme telah menjadi sebuah idiologi yang sangat berbahaya bagi Ikhwanul Muslimin. Dakwah dan pergerakan terus didengungkan oleh Ikhwanul Muslimin demi terciptanya negara yang berbasis agama.

## B. Partai An-Nur Salafi Mesir

Partai An-Nur atau dalam bahasa arab yaitu *Hizb Al-Nur* adalah salah satu partai politik Islam yang terbentuk ketika setelah revolusi Mesir tahun 2011. Partai An-Nur memiliki karakteristik dalam idiologi Islam akan tetapi sangat apik dan ketat pada pelaksanaan syariat Islam. Hal demikian bisa disebut dengan idiologi Ultra-Konservatif dan telah digambarkan sebagai lengat politik *Salafy Call Society*.<sup>17</sup> dengan pergerakan tersebut Partai An-Nur memiliki pemimpin kharismatik yang terus mengemborkan dakwah salafisme di Mesir.

Gerakan dakwah yang sangat fundamental bagi partai ini, bertujuan untuk mencegah Mesir dari sistem kafir, artinya sistem yang jauh dari aturan islam. Al-Nur dibentuk setelah revolusi 2011, pada saat itu pemerintahan otoriter militer sementara Mesir memungkinkan pembentukan partai baru. Partai ini didirikan oleh salah satu kelompok Salafy di Mesir. Call Salafy (*Al-Dakwah Salafiyah*), juga dikenal sebagai gerakan Al-Dawaa.<sup>18</sup> Gerakan filosofis Salafy telah dikaitkan dengan literali, pendekatan yang ketat dan puritan Islam.

Gerakan kelompok salafy telah berjalan pada tahun 1970 dan tegas didirikan pada tahun 1980 di Universitas Alexandria setelah banyak mahasiswa menolak untuk bergabung dengan Ikhwanul Muslimin (IM) yang mengarahkan terhadap bentrokan antara salafy dan Ikhwanul Muslimin karena pelembagaan salafy, artinya adanya “gengsi” bagi kedua gerakan islam ini.

<sup>17</sup> The rise of Salafists has complicated Egyptian politics By Omar Ashour, *The Daily Star*, unexpected 6 January 2012

<sup>18</sup> Baker, Abdul Haqq, *Extrimist in Our Midst : Confronting Terror*, Palgrave Macmillan, 2011

Salafy di masa lalu telah menolak untuk mengambil bagian dari politik karena mereka percaya bahwa sistem demokrasi yang ada pada saat ini tidak islami. Meskipun mereka khawatir dengan politik dari sudut pandang Islam yang berkaitan dengan kehidupan harian di Mesir. Selama revolusi pada tahun 2011, mereka dari partai An-Nur masih ambigu dalam mendukung Mubarak untuk turun, dan mereka beranggapan bahwa Amerika Serikat telah memerintahkan Mubarak untuk membantai para demonstran menurut juru bicara partai An-Nur.

Setelah turunya Mubarak artinya revolusi sudah berakhir, Salafy memutuskan untuk mengambil bagian dari politik untuk melindungi identitas Islam Mesir yang berdasarkan Islam Quran dan Sunnah. Seorang Pengkhotbah dari Salafy yakni Yasser Al Borhamy beralih ke sisi partisipasi politik setelah penggulingan Mubarak, dan dia mengatakan “ Islam harus terlibat dari semua aspek kehidupan, bahkan politik, dan gerakan Islam harus bersatu”.

Partai An-Nur diakui sebagai partai resmi setelah mereka memperoleh lisensi pada juni 2011, dipimpin oleh Emad Abdel Ghaffur.<sup>19</sup> Akan tetapi ketika pada september 2012, Ghoffur dikeluarkan dari An-Nur, kemudian internal An-Nur kembali untuk melakukan pemilihan ketua partai akan tetapi Ghoffur mengundurkan diri dari An-Nur dan membuat partai lagi yang bernama “Watan Party”.

<sup>19</sup> *jadaliya.com*” Jadaliya diakses pada tanggal 19 Oktober 2013

Melihat sejarah yang cukup pendek atas terbentuknya partai tersebut, memiliki ciri khas dalam ideologi pergerakan dan pandangan terhadap demokrasi sendiri. Sehingga ketika adanya kudeta Mursi, mereka menganggap bahwa Mursi atau dari pihak Ikhwanul Muslimin untuk bisa “legowo” turun dari jabatannya selama kurang lebih satu tahun. Pandangan tersebut menurut An-Nur bahwa mereka mendukung kudeta tidak lain dan tidak bukan untuk menekan aksi kekerasan antara oposisi sipil yang menentang Mursi.

Sehingga ketika rezim Mursi berjalan sampai terjadinya kudeta, Partai An-Nur yang berbasis salafi ini tidak menghiraukan ketika saudaranya dari Ikhwanul Muslimin dibantai kurang lebih 54 orang tewas, akan tetapi sampai detik ini, dari pihak An-Nur belum menyatakan dukungan untuk kembalinya Muhammad Mursi berkuasa.<sup>20</sup>

### **C. Partai Demokratik Nasional (PDN)**

Partai Demokratik Nasional atau dalam bahasa Arab disebut *Al-Hizb Al-Watany Ad-Dimuqraty*, atau disebut *Al-Hizb al-Watany* yang artinya Partai Nasional atau Partai Demokratik Nasional Mesir. Partai Politik ini didirikan oleh Presiden Anwar Sadat pada tahun 1978.<sup>21</sup> Mulai eksisnya partai ini memiliki segudang kekuasaan yang kental di dalam Pemerintahan Mesir. PDN memegang kekuasaan yang tidak terbantahkan dalam politik negara.

<sup>20</sup> Bbc.uk. *News world, Middle east*. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2013

<sup>21</sup> Arafat, Alaa al-din 2009, Mubarak, *Kepemimpinan Masa Depan Demokrasi Mesir*. Palgrave Macmillan, Page 14.

Partai Demokratik Nasional (PDN) adalah Partai yang kental dengan otoriter sejak awal berdirinya. Latar belakang partai ini asal muasalanya terlahir dari Partai Uni Sosialis Arab (PUSA), bekas partai yang berkuasa tunggal sejak tahun 1962, dan Partai Demokratik Nasional lah sebagai penerus organik Partai Uni Sosial Arab (PUSA). Namun Partai Demokratik Nasional selama berjalan dalam tubuh pemerintah Mesir sedikit berbelok haluan menjadi Partai yang sangat Otoriter, Moderat dan Sekular.<sup>22</sup>

Setiap diadakanya pemilu di Mesir, Partai yang berkuasa ini selalu membuat ke'curangan', semua institusi didalam negara tersebut wajib memilih partai tersebut, sehingga dalam penyelesaian suat kebijakan sangat kental dengan nepotisme dan otoriter. Sistem pemilu di Mesir dimana Partai Demokrat Nasional dioprasikan untuk memenangkan dalam pemilu dan menghasilkan mayoritas di parlemen didominasi oleh anggota partai ini dan dirancang untuk berkuasa di semua tingkat pemerintahan.<sup>23</sup>

Ketika berjalanya Partai Demokrat Nasional dalam memobilisasi semua institusi negara Mesir, banyak sekali campur tangan rezim otoriter dalam pelebagaan. Sehingga rakyat mesir pada saat dahulu sampai sekarang minimnya menikamati keadilan dan kebebasan sebagai warga negara. Pada tahun 2009 media sekretaris PDN menyatakan bahwa, menggambarkan Mesir sebagai

---

22. El-Mikawy, Noha 1999. *Bangunan Konsensus Dalam Proses Transisi Mesir*. Amerika Univ Kairo Press. Page. 62.

23. "Freedom House". Diakses pada tgl 17 September 2013.

“Firaun” sistem politik, dan Demokrasi sebagai alat untuk menjalankan kepemimpinan otoriter secara jangka panjang.<sup>24</sup>

Munculnya partai-partai politik di Mesir pada abad ke 19 adalah refleksi dari interaksi sosial, ekonomi dan budaya serta lingkungan historis, nasional dan politik tertentu, yang mengarah pada penciptaan dan pengembangan lembaga-lembaga modern administrasi pemerintah dan masyarakat di Mesir seperti parlemen, kabinet, partai politik dan institusi negara.

Partai Demokratik Nasional merupakan Partai yang terbentuk pada tahun 1970 yang masih benih-benih dalam pembentukannya. Dalam kurang lebih 10 tahun partai ini memiliki pembentukan, organisasi, kekuasaan, dasar dan platform populer mereka. Ada pihak-pihak nasional, kelompok didominasi oleh istana kerajaan, yang lain dibentuk oleh otoritas pendudukan serta pihak-pihak ideologis tertentu yang telah diekspresikan.

Pada tahun 1907-1920, partai-partai politik sudah terbentuk di Mesir, demikian sebagai sinyal penyebaran partai politik pada saat itu. Namun mereka (rakyat mesir) masih dibatasi dalam gerak-gerik pembentukan partai karena inggris masih menduduki subordinasi Mesir untuk kekaisaran Ottoman. Kemudian pada Februari 1922 Mesir telah mendeklarasikan kemerdekaan dan dilanjutkan penerbitan konstitusi baru pada tahun 1923 yakni membangun

---

24. NDP insider: *Militer Akan Memastikan Perpindahan Kekuasaan*, US Department of State. 2009-07-30.

konstitusi kerajaan berdasarkan pluralisme dan prinsip-prinsip demokrasi liberal partai.

Selama pada tahun 1923-1952, Mesir menyaksikan pengalaman yang luar biasa kaya dalam praktek politik dan demokrasi, namun pengalaman Mesir tersebut merasakan adanya tekanan politik dari barat yakni Inggris. Inggris terus mencampuri urusan Mesir dan intervensi istana kerajaan dalam kehidupan politik Mesir. Sehingga pada saat itu Mesir tidak lain tidak bukan memiliki aturan yang tunggal yakni dibawah naungan aturan kerajaan Inggris.

Pada bulan Januari tahun 1953, berlakunya sebuah aturan negara yang otoritarian yakni harusnya terbentuk partai tunggal, artinya yang menguasai hanya satu partai saja sampai akhir tahun 1976. kemudian Presiden Anwar Sadat menyatakan era prularisme partai ketika dia menjabat sebagai Presiden. Selama periode ini beberapa kelompok dibentuk sebagai berikut:

1. Kelompok Pembebasan.

Pada tanggal 23 Januari 1953, Kelompok pembebasan didirikan untuk bertujuan menggantikan partai politik yang dibubarkan pada saat kerajaan Inggris menerapkan peraturan satu partai di Mesir. Kelompok ini berkepentingan untuk berevolusi menentang otoritarianisme.

2. Uni Nasional.



Pada tanggal 16 Januari 1956, Presiden Gamal Abdul Nasser menyatakan akhir periode intern dengan membuat atau memperbaharui sebuah konstitusi baru untuk referendum, Uni Nasional sebagai kelompok penting dari semua kelas rakyat Mesir.

### 3. Sosialis Uni Arab (Partai Demokratik Nasional)

Pada tanggal 29 Oktober 1962, Presiden Nasser mengeluarkan keputusan tentang pembentukan komite eksekutif tertinggi Uni Sosialis Arab, hukum yang didasari dan di amandemen tanggal 8 Desember 1962. pendaftaran ke dalam organisasi baru lahir diumumkan pada bulan Januari 1963. Tidak seperti pendahulunya, sosialis Uni Arab adalah sebuah asosiasi untuk kelas pekerja Mesir dan bukan pengelompokan untuk seluruh rakyat Mesir.

Sosialis Uni Arab (Partai Demokratik Nasional) mencerminkan tujuan sebagai berikut:

1. Kontrol Negara atas ekonomi nasional dan membangun sektor publik untuk melakukan proses pembangunan.
2. Menumbuhkan Nasionalisme Arab.
3. Solusi bagi perjuangan kelas, kelas bourjois dan proletar.
4. Demokrasi.

##### 5. Komitmen terhadap agama dan kebebasan iman dan ibadah.

Setelah perang tahun 1967 dan demonstrasi besar-besaran pada bulan Februari dan Oktober tahun 1969, Mesir dalam keadaan kekacauan krisis politik, yang mengarah tentang kesejahteraan rakyat Mesir, pengangguran dan lebih menekankan terhadap pemerintah untuk membela hak-hak rakyat menuntut kebebasan berpendapat dan demokratis.

Kemudian Presiden Anwar Sadat pada bulan Agustus 1974, sadat mengajukan perubahan program kerja intern terhadap Sosialis Uni Arab. Pada bulan Juli 1975, konferensi umum Sosialis Uni Arab mengadopsi resolusi tentang pembentukan forum politik dalam serikat untuk mengusung tentang kebebasan berekspresi sesuai dengan prinsip dasar dari Revolusi Mesir.

Pada bulan Maret tahun 1976, Presiden Sadat mengeluarkan dekrit yang memungkinkan tiga forum untuk mewakili sayap kanan yakni (Organisasi Sosialis Liberal), sayap tengah (Sosialis Uni Arab) dan sayap kiri (Organisasi Persatuan Progresif Nasional). Selama pertemuan pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memberlakukan aturan Partai Politik yang telah diubah oleh Presiden Anwar Sadat pada tanggal 22 november 1976, dan disahkan pada bulan Juni 1977.

Pemberlakuan hukum secara sepihak oleh Sadat pada tahun 1977 memberikan efek yang besar bagi kekuasaan Sosialis Uni Arab (Partai Demokratik Nasional). Dan memungkinkan untuk menguatkan dalam pembentukan partai yang sedang berkuasa yakni Sosialis Uni Arab (Partai

Demokratik Nasional). Meskipun adanya pembentukan partai yang tunggal dalam “demokrasi”, Sosialis Uni Arab memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh bertentangan dengan agama (syariah), dan membangun persatuan nasional, kedamaian sosial, membangun sistem yang demokratis. Kemudian yang menjadi ciri khas dari terbentuknya partai ini adalah tidak memandang basis etnis, agama, asal-usul, jenis kelamin dan sebagainya.

#### **D. Era Kepemimpinan Partai Demokratik Nasional**

##### **1. Partai Demokratik Nasional Era Presiden Nasser**

Sebelum sistem politik multi partai saat ini di Mesir, ada aturan partai tunggal. Gamel Abdel Nasser menolak gagasan pembentukan partai politik alternatif pada pembentukan Republik Mesir pada tahun 1953, bukannya memilih untuk membangun sistem partai tunggal dimana kelompok-kelompok kepentingan terorganisir mengikuti garis fungsional dan terkooperasi dalam kerangka sebuah badan perwakilan resmi. Badan yang dikenal yakni Rally Pembebasan 1952-1956, Uni Nasional (UN) 1956-1962, dan (SUA) Sosialis Uni Arab 1962-1976.<sup>25</sup>

Era Presiden Naser, partai politik tidak memiliki pengalaman paska kekaisaran Mesir yang mana hal demikian telah dimanipulasi oleh Inggris untuk mengamankan kebijakan yang menguntungkan bagi Inggris. Akibatnya para

---

25. Kassem, Maye (2004). *Politik Mesir: Dinamika Rezim Otoriter*. Lynne Reinner. Hal. 51.

pemimpin revolusioner waspada melanjutkan sistem ini. Presiden Nasser pada tahun 1957 mengatakan kepada publik:

“Dapatkah saya mengajukan pertanyaan, apa itu demokrasi? Kami seharusnya memiliki sistem demokrasi selama periode 1923-1953. Tapi apa yang baik dalam demokrasi ini kepada orang-orang kita? Saya akan memberi tahu Anda. Pemilik modal dan pemilik tanah menggunakan sistem demokrasi untuk sebagai alat dari sistem feodal, para petani akan memberikan suara mereka sesuai dengan petunjuk dari majikan mereka. Saya ingin membebaskan para petani dan buruh secara sosial dan ekonomi, saya ingin petani dan buruh mengatakan “ya” dan “tidak” tanpa ini mempengaruhi mata pencaharian mereka atau roti sehari-hari mereka. Hal ini dalam pandangan saya sebagai dasar dari kebebasan dan demokrasi”<sup>26</sup>

Pembebasan Rally tidak dimaksudkan untuk melayani sebagai partai politik, meskipun untuk semua maksud dan tujuan itu berfungsi sebagai partai. Bahkan, Presiden Nasser, menekankan sebaliknya. Perspektif rezim baru adalah, untuk memanfaatkan energi semua pemimpin dan bukan menghilang melalui perdebatan parlemen. Moto pembebasan Rally adalah “Serikat, Order dan Kerja” dan hal demikian untuk menciptakan dasar populer visi misi bagi rezim baru.<sup>27</sup>

Pembebasan Rally dibubarkan pada tahun 1956 dan ditata ulang sebagai partai Uni Nasional untuk mengakomodasi meningkatnya retorika pan-Arab Presiden Nasser. Pergeseran ini bertepatan dengan pembentukan konstitusi baru dan dengan persatuan Suriah dan Mesir pada tahun 1958, yang membentuk Uni

---

26. Ibid. Hal: 51

27. Kassem, Maye (1999). *Dalam Guise Demokrasi: Pemerintahan Kontemporer Mesir*. Itacha Press. Hal. 41.

Arab Republik (UAR). Antara tahun 1949 dan 1955, Suriah telah menyaksikan lima perubahan kepemimpinan, pada akhir musim panas tahun 1957.<sup>28</sup>

Syiria pada tahun 1950an memiliki masalah tensi politik dengan sayap partai komunis di Negara tersebut, yang menyebabkan peningkatan kekhawatiran pengambil alihan dari sayap komunis Syiria. Akan tetapi Partai Ba'ath yang memimpin pemerintahan Syiria meminta penyatuan penuh dengan Mesir yakni dengan sistem serikat Federasi antara Mesir dan Syiria. Dengan penyatuan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menekan komunis Syiria. Kesepakatan tersebut menghasilkan pembentukan Federasi dengan Ibukotanya di Kairo, yang dikelola oleh lembaga yang sama dalam pemerintahan Mesir. Kesepakatan ini membentuk Republik Persatuan Arab dibuat pada tanggal 11 februari 1958. Uni Partai Nasional dirancang dan digunakan oleh Presiden Nasser untuk mengkooperasi aktor politik Syiria ke dalam lembaga Mesir.<sup>29</sup>

Persatuan Mesir dengan Syiria terurai pada tanggal 28 September 1961, setelah kudeta militer. Para pemimpin kudeta juga mengusir semua orang mesir dari Syiria yang mana pada saat itu terjadi pergolakan politik di Syiria. Presiden Nasser percaya bahwa salah satu kegagalan Uni Arab Republik (UAR) karena tingkat reformasi sosial yang diperlukan untuk sebuah proyek yang tidak tercapai.

---

28. Rogan, Eugene (2009). *Arabian: A History*. Basic Books. Hal. 305-317.

29. Dessouki, Ali E. Hillal (1983). *Demokrasi di Mesir*. Universitas Amerika di Kairo Press. Hal. 150.

Oleh karena itu Nasser meningkatkan peran partai dalam kebijakannya yakni sifat sosialis yang diutamakan.

Pada tahun 1962 Nasser mengubah partainya yakni Uni Nasional menjadi Uni Sosialis Arab (USA) untuk mencerminkan perubahan dalam arahan partai tersebut sehingga aturan partai tunggal Mesir mencerminkan mobilisasi rakyat dalam wahana demokrasi mesir yang memang tidak luput dari sistem otoritarian karena masih terpengaruhi aturan kebijakan Inggris yang ingin terus menanamkan gaya kepemimpinan kerajaan yang notabenenya sebagai aturan tunggal.

## **2. Partai Demokratik Nasional Era Presiden Sadat**

Presiden Gamel Nasser meninggal saat memegang jabatan pada tahun 1970. Kemudian penggantinya yakni dari wakilnya yang bernama Anwar Sadat. Dia menjadi Presiden Mesir ketika sistem pemerintahan Mesir untuk lebih dekat memahami sistem multi partai, akan tetapi sistem tersebut masih belum atau jauh diimplementasikan dalam aturan partai Mesir. Pada tahun 1978, Sadat mengubah partai Uni Sosialis Arab (USA) menjadi Partai Demokratik Nasional.<sup>30</sup>

Pada tanggal 2 oktober 1978, Presiden Anwar Sadat menegaskan kembali dalam sebuah pernyataanya, bahwa dia akan berkomitmen untuk membentuk pemerintahanya yang demokratis, melestarikan karakter partai dengan ciri sosialis Mesir, dan menolak teori partai tunggal dan mengakui sistem multi partai.<sup>31</sup>

---

30. *Loc. Cit. Hal. 54*

31. *Loc. Cit.*

Selain itu juga Sadat membuat kebijakan ekonomi Mesir yang baru menggabungkan pemilik modal Arab dengan teknologi Barat untuk mengolah sumber daya Mesir yang berkelimpahan dalam upaya merevitalisasi ekonomi Mesir ke arah yang lebih baik dan mampu untuk menyaingi ekonomi global pada saat itu.

Kebijakan ekonomi baru yang dibuat oleh Sadat dikenal sebagai *Al-infitah Al-Iqtisadi* (Pembukaan Ekonomi, Pasar Bebas). Kebijakan tersebut sangat didukung oleh tubuh Partai Demokratik Nasional itu sendiri sehingga pada tahun 1978 sebagai tahun bermulanya bangkitnya ekonomi Mesir. Melihat kebijakannya tersebut, sekitar 250 anggota parlemen Majelis Rakyat bergegas untuk bergabung dengan partai baru yakni Partai Demokratik Nasional.

Dr Maye Kassem dari Universitas Amerika di Kairo merangkum transisi dari Uni Sosial Arab (USA) menjadi Partai Demokratik Nasional (PDN) sebagai berikut:

“Langkah ini merupakan perubahan yang lebih baik, dimana sebagian besar anggota Partai Demokratik Nasional (PDN) adalah anggota Uni Sosial Arab (USA) yang telah dibubarkan, dengan kata lain konversi massal dari “sosialis untuk “demokrasi” ideologi tersirat tidak hanya keinginan untuk tetap dibawah perlindungan presiden langsung, akan tetapi munculnya partai baru yakni Partai Demokratik Nasional merupakan mencerminkan kepentingan konstituen dari Uni Sosial Arab (USA) yang berada di bawah Presiden Nasser sistem.<sup>32</sup>

Adanya Komite Partai Politik (KPP) telah dibentuk untuk melaksanakan sistem multi partai di Mesir yang mana telah didominasi oleh Partai Demokratik

---

32. Kassem, Maye (2004) *Politik Mesir: Dinamika Otoriter Mesir*. Ithaca Press. Hal. 77.

Nasional Mesir. Akan tetapi hal ini bertujuan sebuah kerangka negara yang mana kelihatan dari luar melakukan demokrasi akan tetapi “real” sebenarnya di lapangan, pemerintahan Mesir melakukan rezim otoriter.<sup>33</sup>

Sejak pembentukan Kabinet tahun 1978 yang diketuai oleh Partai Demokratik Nasional Mesir, pada era tersebut telah mengadakan tiga perempat kursi di Majelis Rakyat. Ideologi (PDN) masih tetap terbuka akan tetapi perlakuan konstitusi negara tersebut masih banyak pro kontra atas kebijakan yang telah diputuskan. Munculnya oposisi terhadap Sadat meningkat pada tahun 1977 dimana Sadat masih melakukan revitalisasi ekonomi Mesir, dan inisiatif perdamaian Israel dan Palestina. Dengan banyaknya penentangan dari oposisi yakni benih-benih gerakan Ikwatul Muslimin sendiri, Sadat telah memberlakukan undang-undang 95 yaitu tentang “Hukum Malu”, yang berarti menangkap oposisi dan mengkriminalisasikan lawan politik. Sadat telah menangkap kurang lebih 1000 tahanan oposisi yang selalu mengkritik pemerintahan tersebut.

Pada tanggal 6 oktober 1981 Sadat telah wafat atas pemberedelan oleh oposisi yang mana pada kejadian tersebut konstelasi politik di Mesir sangat tidak stabil dan sebagai keadaan darurat. Banyak sekali kecaman ataupun dukungan atas kematian Anwar Sadat sang Presiden Mesir tersebut. Setelah terjadinya

---

33. Human Right Watch. Egypt



pembunuhan, pemerintahan Mesir dan Partai Demokratik Nasional langsung menggelar rapat untuk menyiapkan pengganti Sadat.

Husni Mubarak pada saat itu sebagai wakil Presidenya telah sah menggantikan Anwar Sadat. Setelah berjalanya kepemimpinan mubarak. Mesir telah berhasil meningkatkan stabilitas ekonomi dibandingkan dengan mantan presidenya terdahulu. Partai Demokratik Nasional menjadi ikon Mesir selama Mubarak memimpin dan mulailah pada tahun 1982 mubarak telah merombak kabinet Majelis Perwakilan Rakyat. Penulis melihat rezim Mubarak sampai tahun 2011 memiliki segudang permasalahan yang besar, sehingga akan dijelaskan penulisan selanjutnya Partai Demokratik Nasional dibawah pimpinan Husni Mubarak.

### **3. Partai Demokratik Nasional Pada Era Husni Mubarak**

Presiden Husni Mubarak dan Partai Demokratik Nasional (PDN) berkuasa terus menerus sebagai Partai Tunggal akibat masih berlakunya keadaan darurat terus menerus paska jatuhnya Anwar Sadat dan mempertahankan kebijakan dari Amerika Serikat untuk menekan potensi tumbuhnya militan Islam yang akan mengganggu perdamaian dengan Israel. Di dalam negerinya sendiri, sejumlah media termasuk oposisi ataupun beberapa pengkritiknya sering membandingkan Husni Mubarak dengan Firaun Mesir oleh karena kerasnya rezim tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*

Pada tahun 1975, Mubarak diangkat sebagai Wakil Presiden Mesir oleh Anwar Sadat, karena saking terkesanya pada prestasi Mubarak. Inilah awal pengenalan Mubarak dengan dunia politik. Pada tahun 1981, terjadi serangan yang menewaskan Anwar Sadat. Entah bagaimana, Mubarak yang duduk persis di sebelah Anwar Sadat dalam sebuah parade militer di Kairo, 6 oktober 1981, selamat dari serangan granat dan brondongan senapan otomatis para prajurit Mesir yang tidak suka dengan kebijakan Sadat untuk membuat perjanjian damai dengan Israel.

Keberhasilan memimpin Partai Demokratik Nasional (PDN) setelah terbunuhnya Anwar Sadat seakan-akan menjadi awal mulainya kepemimpinan diktator Mesir. Diberlakukannya status darurat sampai turunya Husni Mubarak merupakan ancaman bagi Ikwanul Muslimin dan Partai Oposisi lainnya. Partai Demokratik Nasional (PDN) dibawah Mubarak telah lama menunggangi pemerintahan yang sangat korup, artinya kalangan elite dan orang-orang menengah saja yang menikmati kekayaan dan penghasilan ekonomi Mesir. Sehingga banyak terjadinya pemicu untuk terus masyarakat oposisi Mesir diantaranya Ikhwan dalam memperjuangkan keadilan.

Selama menjadi Presiden sekaligus Ketua Partai Demokratik Nasional (PDN). Mubarak memerintah dengan Diktator.<sup>35</sup> Ia menggunakan UU Darurat itu untuk membat habis lawan-lawan politik dan setiap potensi yang mengancam

---

<sup>35</sup> Bastian, radis. (2013). *Diktator-Diktator yang Mengguncang Dunia*. Banguntapan Jogjakarta Hal. 140

kedudukannya. UU itu memberi wewenang ekstra luas bagi polisi untuk menangkap, menahan, dan menyiksa seseorang yang diduga akan melawan pemerintah tanpa melalui proses pengadilan.

Di bawah kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan Mubarak, ekonomi Mesir mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bidang *real estate*. Namun, buah pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati golongan tertentu saja, yakni orang-orang di lingkaran dalam Mubarak dan Partai Demokratik Nasional (PDN). Kelompok-kelompok oposisi mengatakan, kartel bisnis PDN menggunakan kekuasaan mereka untuk memonopoli kemakmuran negara, sementara sebagian besar rakyat masih hidup miskin. Bahkan, majalah *The Economist* menyebutkan bahwa sekitar 40% dari total 83 juta rakyat Mesir hidup dengan penghasilan di bawah 2 dollar AS (Rp 17.800) per hari.<sup>36</sup>

Karena kebijakan dan kelalaian Mubarak itu, demonstrasi massa yang memprotes kepemimpinan Mubarak di Tahrir Square sejak 25 Januari 2011 berhasil menumbangkannya pada 12 Februari 2011. Meskipun pada 1 Februari, sehari sebelumnya, Mubarak akan menggelar pemilu Presiden pada bulan September. Ia pun menjanjikan amandemen konstitusi. Tetapi, para demonstran menekanya untuk mundur secepatnya. Pada 10 Februari, beredar rumor bahwa Mubarak turun. Puncaknya, wakil Presiden Omar Suleiman mengumumkan mundurnya Mubarak melalui televisi nasional Mesir dan menyerahkan kekuasaannya kepada Militer.

---

<sup>36</sup> archive.kaskus.co.id

### **E. Kerjasama Partai Oposisi Dalam Menggulingkan Husni Mubarak.**

Kerjasama semua kalangan ketika menggulingkan Presiden Husni Mubarak banyak sekali kekacauan yang dihadapi. Ketika membangun satu masa, Ikhwanul Muslimin dan salafi berbondong-bondong mengajak Partai demokratik Nasional dan pecahanya untuk mendukung penggulingan Husni Mubarak. Penggulingan tersebut diwarnai dengan kerusuhan antara militer dan sipil sehingga banyak sekali korban di antaranya anak-anak, orang tua dan dewasa.

Berbaurnya kelompok oposisi sipil baik dari Ikhwanul Muslimin, Salafi dan Partai Demokratik Nasional menjadikan boomerang bagi kepemimpinan diktator Husni Mubarak. Ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi sebab semua elemen masyarakat bekerjasama untuk menggulingkan Mursi. Mobilisasi Ikhwanul Muslimin pada semua masyarakat Mesir telah sukses dibangun selama berpuluh-puluh tahun dipimpin oleh sistem yang otoriter.

Kerjasama memobilisasi massa untuk segera menghentikan Mesir dari cengkraman otoriter menjadi sebuah cita-cita rakyat Mesir secara keseluruhan. Roda pemerintahan otoriter telah banyak memiliki dosa besar politik selama berpuluh tahun menggambarkan bahwa Mesir diambang kehancuran dan semakin terbelakang dalam mencapai kebebasan dan keadilan. Sehingga Ikhwanul Muslimin, Salafi dan Partai Demokratik Nasional telah bisa merasakan apa yang selama ini diderita oleh masyarakat Mesir pada umumnya. Kerjasama tersebut telah terbukti sukses dalam menggulingkan Husni Mubarak pada tahun 2011.